

Judul : Penataan perlintasan KA, Komisi V: keselamatan jadi prioritas utama
Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penataan Perlintasan KA

Komisi V: Keselamatan Jadi Prioritas Utama

ANGGOTA Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto menyroti penataan perlintasan sebidang kereta api (KA) yang masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Penataan perlintasan sebidang ini kudu dipercepat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Sofwan masih menemukan perlintasan sebidang yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 94 Tahun 2018. Beberapa titik memiliki jarak antar perlintasan yang tidak sesuai aturan hukum. Sebagian perlintasan lain bahkan masih beroperasi tanpa izin resmi.

Dia mendesak Pemerintah bersama para semua pemangku kepentingan segera mendata seluruh perlintasan sebidang. Langkah inventarisasi itu dijadikan dasar penyusunan strategi penataan yang lebih terukur serta tepat sasaran. "Pendataan menyeluruh diharapkan bisa menyelesaikan masalah di lapangan," katanya, kemarin.

Sofwan menegaskan, inventarisasi harus bisa memetakan perlintasan yang melanggar regu-

lasi serta menentukan titik yang perlu ditutup. Pendataan itu juga berguna memilah lokasi yang dipertahankan karena berfungsi untuk mobilitas masyarakat. Melalui langkah penataan ini, semua pihak akan memiliki kepastian data baku.

Jika ada perlintasan yang tidak mungkin ditutup karena mengganggu aktivitas masyarakat, lanjutnya, maka keberadaannya wajib mengantongi izin Pemda setempat. Aturan perizinan itu harus dijalankan secara ketat sesuai ketentuan. "Namun, keputusan akhir dari kebijakan tersebut tetap bertumpu pada keakuratan basis data lapangan," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Edi Purwanto menambahkan, pihaknya belum melihat keselamatan perkeretaapian belum jadi prioritas utama. Padahal, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan penanganan pascakecelakaan maut di Bekasi. Arahan itu belum direspons secara maksimal di lapangan sampai saat ini.

Keterbatasan anggaran, menurut Edi, turut menghambat berbagai pelaksanaan program stra-



Sofwan Dedy Ardyanto

tegis pada sektor perkeretaapian secara nasional. Dari total pagu kebutuhan dana yang diajukan, hanya sekitar 58 persen anggaran yang bisa dipenuhi. "Dampaknya, sejumlah program keselamatan perjalanan belum bisa berjalan secara optimal," terangnya.

Kondisi itu, kata dia, memicu backlog anggaran sektor perhubungan yang mencapai Rp 26 triliun dari total keseluruhan mitra Komisi V DPR Rp 252 triliun. Defisit anggaran itu menghambat modernisasi persinyalan dan pembangunan perlintasan tidak se-

bidang. Keterbatasan dana ini juga menurunkan peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

Edi mengusulkan Pemerintah mengkaji pengelolaan perkeretaapian yang terintegrasi penuh melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pembenahan itu mencakup penanganan jalur sebidang dan sistem persinyalan kereta. Integrasi sistem operasional itu juga harus menerapkan teknologi Automatic Train Control menyeluruh.

Peningkatan pelayanan dan keselamatan masyarakat, lanjut Edi, harus segera direalisasikan tanpa melihat pihak mana yang mengelola sektor transportasi massal itu. Dalam kebijakan ini, urusan pengelola perjalanan tidak jadi masalah utama. "Fokus paling mendasar adalah mewujudkan keselamatan yang benar-benar prioritas utama publik," tegasnya.

Merespons hal itu, Kemenhub menargetkan penyelesaian 1.214 titik perlintasan sebidang di berbagai wilayah hingga tahun 2027 mendatang. Khusus sepanjang tahun ini, sebanyak 190 titik ditargetkan bisa rampung dikerjakan. Program strategis

tersebut diharapkan bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan, pihaknya telah merangkul operator KAI serta Pemda untuk menyelesaikan masalah perlintasan sebidang. Kerja sama itu dirancang secara komprehensif agar penanganan berjalan lancar. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat realisasi perbaikan fasilitas keselamatan di lapangan.

Dia bilang, salah satu bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menggandeng BUMN melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan. Sebanyak 1.214 titik ditargetkan selesai tahun depan lewat skema kerja gotong royong itu. Program CSR ini difokuskan pada pengadaan fisik bangunan pos jaga.

Nantinya, pos jaga dan pintu perlintasan kereta itu dihibahkan agar resmi jadi aset milik negara. Kemenhub akan menyediakan petugas penjaga untuk mengoperasikan serta merawat fasilitas operasional itu secara berkala. ■ PYB